

PELAKSANAAN SISTEM TANAM PAKSA di PALEMBANG 1830-1870 (SUATU KAJIAN HISTORIS)

Resti Juwita Maharani¹, Nurhayati Dina², Dewi Setyawati³.

Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: restijuwitamaharani@gmail.com¹, nurhayatidina666799@gmail.com²,

Destya11@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) di Palembang tahun 1830–1870. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa, mekanisme pelaksanaannya, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Palembang serta kritik dan proses penghapusan sistem tanam paksa tahun 1830–1870. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan historis, politik, sosial, ekonomi, geografi, dan militer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan arsip, buku, jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan. Tahapan penelitian meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanam paksa di Palembang dilatarbelakangi oleh krisis keuangan pemerintah kolonial Belanda setelah Perang Diponegoro dan konflik di Eropa, kegagalan sistem pajak tanah (*landrente*), serta keinginan Belanda memperoleh pemasukan cepat melalui eksploitasi hasil pertanian. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama pemerintah kolonial dengan elite lokal seperti pasirah, depati, dan kepala marga untuk mengawasi penanaman tanaman ekspor, terutama kopi dan lada. Dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat, seperti kerja paksa, perluasan lahan tanam melebihi ketentuan, dan rendahnya pembayaran hasil panen. Sistem ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, perubahan struktur sosial, serta perubahan pola ekonomi masyarakat Palembang dari sistem agraris tradisional menuju ekonomi kolonial berorientasi ekspor. Dengan demikian, sistem tanam paksa di Palembang merupakan bentuk eksploitasi kolonial yang lebih menguntungkan pemerintah Belanda dibanding masyarakat pribumi.

Kata kunci: Sistem Tanam Paksa, *Cultuurstelsel*, Kolonialisme, Palembang.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Cultivation System (Cultuurstelsel) in Palembang from 1830 to 1870. The purpose of this study is to determine the background of the implementation of the Cultivation System, its implementation mechanism, its impacts on the lives of the people of Palembang, as well as the criticism and abolition process of the Cultivation System during 1830–1870. The method used in this research is the historical method with historical, political, social, economic, geographical, and military approaches. Data collection techniques were carried out through library research by utilizing archives, books, journals, and relevant historical documents. The stages of the research included heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study show that the implementation of the Cultivation System in Palembang was motivated by the financial crisis of the Dutch colonial government after the Java War and conflicts in Europe, the failure of the land tax system (landrente), and the Dutch desire to obtain rapid income through the exploitation of agricultural products. Its implementation was carried out through cooperation between the colonial government and local elites such as pasirah, depati, and clan leaders in supervising the cultivation of export crops, especially coffee and pepper. In practice, many irregularities occurred that harmed the community, such as forced labor, expansion of cultivated land beyond the stipulated provisions, and low payments for harvests. This system had impacts on the decline of community welfare, the increase of poverty, changes in social structures, and shifts in the economic pattern of Palembang society from a traditional agrarian system to an export-oriented colonial economy. Thus, the Cultivation System in Palembang was a form of colonial exploitation that benefited the Dutch government more than the indigenous people

Keywords : Forced Cultivation System, *Cultuurstelsel*, Colonialism, Palembang

©Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang

DOI: <https://doi.org/10.32502/jdh.v6i1.11215>

PENDAHULUAN

Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) merupakan kebijakan ekonomi kolonial Belanda yang mulai diterapkan sejak tahun 1830 pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch. Kebijakan ini lahir sebagai upaya pemerintah kolonial untuk mengatasi krisis keuangan Belanda setelah terjadinya Perang Jawa (1825–1830) dan konflik Belanda–Belgia (1830–1831). Melalui sistem ini, rakyat di wilayah jajahan diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila serta menyerahkan sebagian besar hasilnya kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Menurut Susilo dan Sarkowi, “Van den Bosch membuat peraturan bagi rakyat untuk menyerahkan pajak tanah (*Landrento*) untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang laku di Eropa” (Susilo & Sarkowi, 2020: 15). Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu bentuk eksploitasi kolonial yang memberi keuntungan besar bagi Belanda, namun menimbulkan penderitaan bagi masyarakat pribumi.

Lahirnya *Cultuurstelsel* tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme Eropa di Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada awalnya hanya bertujuan melakukan perdagangan rempah-rempah, namun persaingan antarnegara Eropa mendorong munculnya upaya monopoli perdagangan dan penguasaan wilayah. Absiroh dkk menjelaskan bahwa “keadaan itu perlahan-lahan mulai berubah, karena tingginya persaingan perdagangan antar negara menyebabkan bangsa-bangsa Eropa berusaha menguasai sumber-sumber rempah-rempah” (Absiroh dkk., 2017: 5). Bahkan jauh sebelumnya, menurut

Susilo dan Sarkowi, jatuhnya Konstantinopel menjadi salah satu faktor penting yang mengubah jalur perdagangan dunia dan mendorong bangsa Eropa mencari jalur baru menuju Asia (Susilo & Sarkowi, 2020: 14).

Di Palembang, campur tangan Belanda dimulai sejak abad ke-17 ketika VOC datang sebagai kongsi dagang. Penguasa Kesultanan Palembang pada awalnya menerima kehadiran Belanda karena dianggap dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut (Abdullah dkk., 1991: 72). Akan tetapi, hubungan tersebut kemudian berubah menjadi konflik akibat keinginan VOC memonopoli perdagangan lada dan timah Bangka. Ketegangan antara Kesultanan Palembang dan VOC memunculkan berbagai peperangan, termasuk serangan VOC pada tahun 1659 yang menyebabkan Keraton Kuto Gawang dihancurkan dan dibakar (Kielstra, 1892: 76–94). Peristiwa tersebut menjadi awal semakin kuatnya pengaruh Belanda dalam bidang politik dan ekonomi di Palembang.

Campur tangan kolonial semakin besar ketika VOC memanfaatkan konflik internal keluarga Kesultanan Palembang. Menurut Abubakar dkk., atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirim ekspedisi militer yang kemudian membantu Pangeran Jaya Wikrama naik takhta sebagai Sultan Mahmud Badaruddin I (Abubakar dkk., 2020: 39). Sebagai imbalannya, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada dan timah Bangka di Palembang selama hampir satu abad (Abdullah dkk., 1991: 79). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Belanda tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga

mulai mengendalikan politik lokal di Palembang.

Setelah VOC dibubarkan tahun 1799, kekuasaan kolonial Belanda di Palembang semakin menguat. Konflik antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Inggris dan Belanda pada awal abad ke-19 berakhir dengan jatuhnya Kesultanan Palembang ke tangan Belanda. Pada tahun 1821 Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditangkap dan diasingkan ke Ternate, sedangkan pada tahun 1823 Kesultanan Palembang resmi dibubarkan dan wilayahnya dijadikan Keresidenan Palembang di bawah pemerintahan kolonial Belanda (Abubakar dkk., 2020: 59). Setelah penghapusan kesultanan, Belanda membangun birokrasi kolonial baru melalui sistem keresidenan, afdeeling, dan onder afdeeling yang dipimpin oleh pejabat kolonial seperti residen, asisten residen, dan kontrolir (Rivai, 2001: 13).

Penghapusan Kesultanan Palembang memudahkan pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa karena Palembang memiliki potensi ekonomi yang besar. Kondisi tanah yang subur serta jaringan sungai yang luas mendukung pengangkutan hasil perkebunan ke pelabuhan. Margana menyatakan bahwa "Palembang memiliki tanah endapan sungai yang sangat subur serta didukung jaringan sungai yang memudahkan pengangkutan hasil panen ke pelabuhan" (Margana, 2012: 45). Setelah kesultanan dibubarkan, Belanda juga memperoleh kendali penuh atas pemerintahan lokal sehingga lebih mudah mengatur tenaga kerja dan produksi tanaman ekspor (Wahyono, 2018: 73).

Pelaksanaan Cultuurstelsel di Palembang berfokus pada perkebunan kopi di wilayah Muara

Enim, Lahat, Pagar Alam, Hulu Musi, dan Empat Lawang. Hafiz menjelaskan bahwa "tanam paksa yang dilakukan di Palembang terjadi pada perkebunan kopi" (Hafiz, 2020: 9). Tanaman kopi sendiri telah dibudidayakan sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam, terutama di daerah dataran tinggi seperti Lahat dan Pagar Alam (Safitri, 2017: 87). Dalam pelaksanaannya, rakyat diwajibkan menyediakan sebagian lahannya untuk tanaman ekspor dengan pengawasan pejabat kolonial dan kepala marga. Meskipun aturan resmi memberikan berbagai ketentuan perlindungan bagi rakyat, pelaksanaannya sering menyimpang. Sawirman menjelaskan bahwa pelaksanaan Cultuurstelsel di lapangan justru semakin membebani rakyat dan menyebabkan hasil pertanian lokal menurun (Sawirman, 2010: 112). Selain itu, Darmawan menyebutkan bahwa para pemimpin lokal yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial turut menekan rakyat untuk menyerahkan hasil panen lebih banyak sehingga sistem ini menjadi sangat menindas (Darmawan, 2015: 57).

Penerapan sistem Tanam Paksa membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Palembang. Produksi pangan menurun karena tenaga dan lahan lebih banyak diarahkan untuk tanaman ekspor. Hubungan antara rakyat dan kepala marga juga berubah karena pemimpin lokal berperan sebagai perantara pemerintah kolonial (Suharto, 2011: 102). Di bidang budaya, pola pertanian tradisional masyarakat mengalami perubahan akibat campur tangan pemerintah kolonial dalam pengelolaan lahan dan pola tanam (Mahyuddin, 2013: 76).

Berbagai penderitaan akibat sistem Tanam Paksa kemudian memunculkan kritik dari berbagai pihak. Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa sistem ini membebani rakyat melalui kewajiban menanam tanaman ekspor dan kerja paksa yang mengabaikan kebutuhan pangan masyarakat (Kartodirdjo, 1993: 45). Selain itu, Deliar Noer menjelaskan bahwa pelaksanaan tanam paksa sering disertai penyimpangan seperti pajak berlebihan dan pemaksaan tenaga kerja di luar aturan yang telah ditetapkan (Noer, 1980: 78). Kritik-kritik tersebut akhirnya mendorong pemerintah kolonial secara bertahap menghapus sistem Tanam Paksa dan menggantinya dengan sistem ekonomi liberal pada paruh kedua abad ke-19.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai sistem Tanam Paksa umumnya lebih banyak membahas pelaksanaannya di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus membahas pelaksanaan sistem Tanam Paksa di Palembang pada tahun 1830–1870 setelah dibubarkannya Kesultanan Palembang Darussalam. Penelitian ini juga menyoroti peran pejabat lokal dalam birokrasi kolonial serta dampak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat Palembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Cultuurstelsel di Palembang sebagai bagian dari strategi eksploitasi kolonial Belanda di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Metode historis digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif melalui sumber-sumber yang relevan dan otentik. Dalam penelitian ini, metode historis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan sistem tanam paksa di Palembang tahun 1830–1870.

Tahapan penelitian meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah berupa buku, jurnal, arsip, dokumen kolonial, dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan sistem tanam paksa di Palembang, pada tahap ini peneliti berusaha memperoleh data sebanyak mungkin yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahap verifikasi dilakukan dengan menyeleksi dan mengkritisi sumber untuk memperoleh data yang valid dan otentik, Kritik sumber dibedakan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian sumber, misalnya dengan memeriksa siapa penulisnya, kapan sumber dibuat serta apakah dokumen tersebut asli atau salinan. Kritik intern dilakukan untuk menguji isi sumber, yaitu dengan menilai kebenaran informasi yang disampaikan, tingkat objektivitas penulis, serta kesesuaian informasi dengan sumber-sumber lain. Melalui proses kritik sumber, peneliti dapat menyaring data sehingga hanya fakta-fakta yang terpercaya yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh, peneliti tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menghubungkan satu fakta dengan

fakta lainnya sehingga terbentuk suatu pemahaman yang utuh mengenai peristiwa yang diteliti. Peneliti berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat, latar belakang, proses terjadinya suatu peristiwa, serta dampak yang ditimbulkannya. Interpretasi sangat penting karena fakta sejarah yang berdiri sendiri belum dapat menjelaskan suatu peristiwa secara menyeluruh tanpa adanya penafsiran yang logis dan berdasarkan bukti yang kuat. Tahap terakhir yaitu historiografi. Pada tahap ini, seluruh fakta yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan disusun secara sistematis, kronologis dan ilmiah sehingga menjadi sebuah narasi sejarah yang mudah dipahami. Penulisan sejarah harus didasarkan pada sumber yang valid, menggunakan bahasa yang jelas dan objektif serta menyajikan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari tahap historiografi dapat berupa artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi maupun buku sejarah. Dengan demikian, melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian sejarah dapat menghasilkan rekonstruksi masa lalu yang ilmiah, objektif dan mendekati kebenaran sejarah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan historis, politik, sosial, ekonomi, geografi, dan militer. Pendekatan historis digunakan untuk memahami peristiwa masa lalu secara kronologis. Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis kekuasaan pemerintah kolonial dalam menerapkan sistem tanam paksa. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat dampak sosial terhadap masyarakat Palembang. Pendekatan

ekonomi digunakan untuk mengkaji pengaruh sistem tanam paksa terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pendekatan geografi digunakan untuk memahami pengaruh kondisi wilayah Palembang terhadap pelaksanaan tanam paksa, sedangkan pendekatan militer digunakan untuk memahami peran kekuatan kolonial dalam mempertahankan kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Palembang Tahun 1830-1870

Penerapan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) di Palembang tidak dapat dipisahkan dari kondisi krisis ekonomi yang dialami pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Setelah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830), pemerintah Belanda mengalami defisit anggaran yang besar akibat biaya perang yang tinggi. Selain itu, konflik di Eropa seperti perang Belanda dengan Belgia semakin memperburuk keadaan keuangan negara. Dalam kondisi tersebut, pemerintah kolonial membutuhkan sumber pemasukan baru yang mampu memberikan keuntungan secara cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa sebagai kebijakan ekonomi kolonial untuk memulihkan kas negara Belanda. Menurut Sondarika, "kebijakan tanam paksa dilatarbelakangi oleh kesulitan finansial akibat perang besar yang menguras anggaran negara" (Sondarika, 2015: 2).

Selain faktor krisis keuangan, penerapan tanam paksa juga dipengaruhi oleh kegagalan sistem pajak tanah (*landrente*) yang sebelumnya diterapkan pada masa

Thomas Stamford Raffles. Sistem pajak tanah dinilai tidak efektif karena pemerintah kolonial belum memiliki administrasi yang baik untuk mendata luas tanah, tingkat kesuburan dan hasil pertanian masyarakat. Akibatnya, penetapan pajak sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga memberatkan petani dan menimbulkan berbagai perlawanan di pedesaan. Kartodirdjo menjelaskan bahwa kelemahan administrasi kolonial menyebabkan pelaksanaan *landrente* tidak berjalan secara efektif dan justru menimbulkan tekanan terhadap masyarakat desa (Kartodirdjo, 1993: 52). Lebih lanjut Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan struktur sosial masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi kepemilikan komunal dan kekuasaan elite lokal (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 171). Oleh sebab itu, pemerintah kolonial menggantinya dengan sistem tanam paksa yang dianggap lebih mampu menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negara kolonial.

Kebutuhan pemerintah Belanda untuk memperoleh pemasukan secara cepat juga menjadi faktor utama diterapkannya *cultuurstelsel*. Melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial menguasai langsung proses produksi tanaman ekspor seperti kopi, gula dan nila dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi. Furnivall menjelaskan bahwa sistem tanam paksa memungkinkan pemerintah memperoleh keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan modal yang tinggi karena seluruh proses produksi ditanggung oleh masyarakat pribumi (Furnivall, 2009: 152). Keuntungan dari sistem ini dikenal dengan istilah *batig slot*, yaitu surplus keuntungan yang diperoleh Belanda dari hasil

ekspor tanaman wajib di Hindia Belanda.

Selain untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sistem tanam paksa juga merupakan bentuk upaya Belanda menghidupkan kembali sistem monopoli ekonomi seperti yang pernah dijalankan VOC. Setelah VOC dibubarkan tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi kolonial dan menerapkan sistem kontrol langsung terhadap produksi dan perdagangan hasil bumi. Suhartono menjelaskan bahwa pemerintah kolonial mengatur produksi, distribusi dan pemasaran hasil pertanian rakyat secara terpusat sehingga sistem ini menyerupai monopoli VOC dalam bentuk baru (Suhartono, 2010: 132). Oleh sebab itu, *cultuurstelsel* sering dipandang sebagai bentuk eksploitasi kolonial yang dilakukan negara terhadap masyarakat pribumi.

Di Palembang, penerapan tanam paksa semakin mudah dilakukan setelah Kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan pada tahun 1823. Setelah penghapusan kesultanan, Belanda memperoleh kontrol penuh atas wilayah Palembang dan membentuk sistem administrasi kolonial melalui pembagian keresidenan, *afdeeling* dan *onder afdeeling*. Menurut Rivai, pemerintah kolonial menunjuk J.L. van Sevenhoven sebagai Residen pertama Palembang dan membagi wilayah tersebut ke dalam beberapa *afdeeling* untuk memperkuat pengawasan kolonial (Rivai, 2001: 13). Struktur pemerintahan kolonial tersebut memudahkan Belanda mengontrol masyarakat dan mengatur produksi tanaman ekspor.

Faktor geografis dan sumber daya alam juga menjadi alasan penting

diterapkannya tanam paksa di Palembang. Wilayah Palembang memiliki tanah yang subur serta jalur transportasi sungai yang memudahkan pengangkutan hasil perkebunan menuju pelabuhan perdagangan. Menurut Zulkarnain, daerah seperti Besemah, Lahat, Tebing Tinggi dan Pagar Alam dipilih sebagai pusat pelaksanaan tanam paksa karena memiliki kondisi alam yang sangat cocok untuk tanaman kopi dan lada (Zulkarnain, 2011: 58). Selain itu, Sungai Musi dimanfaatkan sebagai jalur utama distribusi hasil perkebunan menuju pusat perdagangan kolonial di Palembang.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kolonial juga memanfaatkan elite lokal seperti pasirah, depati dan kepala marga untuk mengawasi masyarakat desa. Kurniawan menjelaskan bahwa sistem tanam paksa tidak hanya menjadi kebijakan ekonomi, tetapi juga alat kontrol sosial kolonial karena pemerintah memanfaatkan struktur sosial tradisional untuk menggerakkan tenaga kerja pribumi secara massal (Kurniawan, 2014: 45). Dengan demikian, penerapan tanam paksa di Palembang menunjukkan bahwa kebijakan kolonial Belanda bertujuan memperkuat dominasi politik dan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja masyarakat pribumi.

2. Mekanisme dan Aturan Pokok Sistem Tanam Paksa di Palembang

Pelaksanaan sistem tanam paksa di Palembang pada dasarnya mengikuti aturan pokok *cultuurstelsel* yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Akan tetapi, penerapannya di Palembang memiliki karakteristik tersendiri

Resti dkk, Pelaksanaan Sistem Tanam...

karena dipengaruhi kondisi geografis, struktur sosial masyarakat dan jenis komoditas perkebunan yang berbeda dengan Pulau Jawa. Tanaman utama yang dikembangkan di wilayah ini ialah kopi dan lada yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional.

Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan tahun 1823, pemerintah kolonial memperoleh kekuasaan langsung terhadap wilayah dan masyarakat Palembang. Kondisi tersebut membuat Belanda lebih mudah mengatur tenaga kerja, sistem pajak dan produksi pertanian masyarakat untuk kepentingan kolonial. Zed menjelaskan bahwa hilangnya kekuasaan kesultanan memberikan peluang bagi pemerintah kolonial untuk mengendalikan masyarakat secara langsung demi kepentingan ekonomi kolonial (Zed, 2010: 88).

Mekanisme pelaksanaan tanam paksa dilakukan melalui kerja sama antara pejabat kolonial dan elite lokal seperti pasirah, depati serta kepala marga. Para elite lokal tersebut bertugas mengawasi penanaman tanaman wajib, pengumpulan hasil panen hingga memastikan masyarakat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan pemerintah kolonial. Wasino menjelaskan bahwa elite lokal berada dalam posisi dilematis karena harus mematuhi pemerintah kolonial, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhadapan langsung dengan penderitaan rakyat di wilayahnya (Wasino, 2007: 41). Dalam praktiknya, elite lokal sering dijadikan alat pemerintah kolonial untuk menekan masyarakat agar target produksi tercapai.

Pelaksanaan tanam paksa di Palembang umumnya dipusatkan di wilayah pedalaman yang memiliki

tanah subur dan cocok dijadikan lahan perkebunan. Masyarakat diwajibkan membuka lahan baru untuk menanam kopi dan hasil panennya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak. Kartodirdjo dan Suryo menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan petani kehilangan kebebasan menentukan harga jual hasil pertaniannya sendiri, sedangkan keuntungan terbesar diperoleh pemerintah kolonial dan pedagang Eropa (Kartodirdjo & Suryo, 1991: 67).

Pengumpulan hasil tanam paksa dilakukan secara bertingkat melalui kepala marga dan pejabat kolonial di tingkat keresidenan sebelum hasil perkebunan dikirim ke pelabuhan Palembang untuk diekspor ke luar negeri. Dalam proses distribusi tersebut, Sungai Musi menjadi jalur utama pengangkutan hasil perkebunan dari daerah pedalaman menuju pusat perdagangan kolonial. Menurut Mubyarto, penguasaan jalur sungai dan perdagangan menjadi bagian penting dalam mekanisme tanam paksa di Palembang (Mubyarto, 1992: 102).

Pada dasarnya, aturan resmi tanam paksa yang tercantum dalam Staatsblad 1834 No. 22 mengatur bahwa masyarakat hanya diwajibkan menyediakan seperlima tanahnya untuk tanaman ekspor dan waktu kerja yang diberikan tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Selain itu, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak dan apabila hasil panen mengalami kerusakan bukan karena kesalahan petani maka kerugian akan ditanggung pemerintah. Namun, dalam praktiknya aturan tersebut sering dilanggar. Zulkarnain

menjelaskan bahwa masyarakat di berbagai daerah, termasuk Palembang, sering dipaksa menyerahkan lahan lebih luas dan bekerja lebih berat dibanding ketentuan resmi pemerintah kolonial (Zulkarnain, 2015: 5).

Selain menyerahkan hasil panen, masyarakat juga dibebani kerja rodi seperti membuka jalan, mengangkut hasil perkebunan dan bekerja di perkebunan kolonial tanpa upah yang layak. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan waktu untuk mengurus lahan pertanian sendiri sehingga produksi bahan pangan menurun. Zulkarnain menyatakan bahwa beban kerja yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakat pedesaan mengalami kemerosotan karena tenaga dan sumber daya mereka lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pemerintah kolonial dibanding kebutuhan hidup sendiri (Zulkarnain, 2011: 12).

Penerapan tanam paksa di Palembang juga membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat. Sebelum sistem ini diterapkan, masyarakat pedalaman Palembang umumnya menjalankan pola pertanian subsisten yang bertujuan memenuhi kebutuhan sendiri. Namun setelah diberlakukannya *cultuurstelsel*, masyarakat mulai dipaksa mengenal sistem ekonomi uang dan produksi komoditas ekspor. Nawiyanto menjelaskan bahwa perubahan tersebut menggeser pola kehidupan masyarakat dari pertanian tradisional menuju sistem ekonomi kolonial yang berorientasi pasar internasional (Nawiyanto, 2022: 145).

Dengan demikian, mekanisme tanam paksa di Palembang menunjukkan adanya sistem eksploitasi kolonial yang

memanfaatkan tenaga kerja, lahan dan struktur sosial masyarakat demi kepentingan ekonomi Belanda. Walaupun secara resmi pemerintah kolonial mengklaim sistem tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan yang melindungi rakyat, kenyataannya masyarakat pribumi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

3. Dampak Ekonomi, Sosial dan Kultural Sistem Tanam Paksa di Palembang

Pelaksanaan sistem tanam paksa di Palembang membawa dampak besar dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Dalam bidang ekonomi, sebagian besar tenaga kerja dan lahan pertanian digunakan untuk menanam tanaman ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial sehingga produksi bahan pangan menurun dan masyarakat kehilangan kebebasan menentukan jenis tanaman. Keuntungan hasil perkebunan lebih banyak dinikmati pemerintah kolonial, sedangkan rakyat pribumi memperoleh hasil yang sangat kecil dibanding tenaga yang dikeluarkan (Romadi, 2011: 113).

Sistem tanam paksa juga memperkenalkan ekonomi uang melalui pajak, perdagangan hasil tanaman dan sistem upah. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan rakyat karena masyarakat tetap berada dalam posisi lemah dan sering mengalami ketergantungan ekonomi serta utang akibat tingginya tuntutan produksi (Kurniawan, 2015: 142).

Dalam bidang sosial, tanam paksa menimbulkan kesenjangan antara elite lokal dan rakyat biasa. Pemerintah kolonial memanfaatkan kepala desa, wedana dan kepala

marga untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan sehingga elite lokal memiliki kedudukan lebih dekat dengan pemerintah kolonial, sementara rakyat kecil menjadi pihak yang paling menderita. Kondisi ini memperkuat stratifikasi sosial di masyarakat Palembang (Sondarika, 2015: 3).

Selain itu, pola kerja masyarakat juga berubah. Masyarakat yang sebelumnya bekerja berdasarkan kebutuhan keluarga dan tradisi lokal harus mengikuti jadwal kerja serta target produksi yang ditentukan pemerintah kolonial. Akibatnya, masyarakat kehilangan kebebasan mengatur tenaga dan hasil kerjanya sendiri (Hanafi & Nawiyanto, 2022: 145).

Dalam bidang budaya, sistem tanam paksa menyebabkan perubahan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan pola kehidupan agraris. Hubungan antara rakyat dan elite lokal mengalami ketegangan karena para kepala desa dianggap lebih berpihak kepada pemerintah kolonial daripada masyarakat (Romadi, 2011: 118). Selain itu, masyarakat mulai mengenal sistem ekonomi pasar dan produksi komersial yang berorientasi keuntungan, meskipun lebih menguntungkan pemerintah Belanda daripada rakyat pribumi (Kurniawan, 2015: 146).

Dengan demikian, sistem tanam paksa tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat Palembang, tetapi juga mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat pedesaan demi kepentingan ekonomi kolonial Belanda.

4. Kritik dan Penghapusan Sistem Tanam Paksa di Palembang

Sistem tanam paksa mendapat banyak kritik karena dianggap menimbulkan penderitaan bagi masyarakat pribumi. Di Palembang, rakyat diwajibkan menyerahkan tanah dan tenaga untuk tanaman ekspor sehingga kesejahteraan masyarakat menurun dan petani harus bekerja keras tanpa memperoleh keuntungan yang layak (Zulkarnain, 2015: 45).

Kritik juga muncul karena banyak terjadi penyimpangan aturan. Meskipun pemerintah kolonial menetapkan kewajiban hanya seperlima tanah, dalam praktiknya banyak petani dipaksa menyerahkan lahan lebih luas dan bekerja melebihi ketentuan. Sistem ini dinilai tidak manusiawi karena rakyat dijadikan alat produksi demi keuntungan kolonial (Zulkarnain, 2011: 7).

Di Belanda, kritik berkembang seiring munculnya pemikiran ekonomi liberal yang menolak campur tangan pemerintah secara berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Kaum liberal menganggap tanam paksa sebagai bentuk eksploitasi terhadap penduduk pribumi (Tasnur dkk., 2022: 52).

Kritik kemanusiaan semakin kuat setelah terbitnya novel Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker pada tahun 1860 yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat penyalahgunaan kekuasaan kolonial (Kartodirdjo & Suryo, 1991: 78). Tekanan moral dan politik tersebut mendorong pemerintah Belanda mempertimbangkan perubahan kebijakan kolonial.

Selain faktor kemanusiaan, penghapusan tanam paksa juga dipengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Pemerintah Belanda mulai

membuka kesempatan bagi perusahaan swasta Eropa menanamkan modal di Hindia Belanda. Lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 menandai dimulainya sistem ekonomi liberal dan berakhirnya tanam paksa secara bertahap (Sinaga dkk., 2025: 113–114).

Walaupun mulai dihapuskan sejak 1870, pengaruh sistem tanam paksa masih terasa di Palembang karena struktur ekonomi kolonial kemudian diteruskan oleh perusahaan-perusahaan swasta asing. Dengan demikian, penghapusan tanam paksa bukan berarti berakhirnya eksploitasi kolonial, melainkan perubahan bentuk dari monopoli pemerintah menjadi dominasi modal swasta.

KESIMPULAN

Sistem tanam paksa di Palembang diterapkan karena pemerintah kolonial Belanda mengalami krisis keuangan setelah Perang Diponegoro dan konflik di Eropa, sehingga wilayah jajahan dijadikan sumber pemasukan. Kegagalan sistem pajak tanah (*landrente*), keinginan menghidupkan kembali monopoli ekonomi, serta kondisi Palembang yang subur dan strategis dengan jalur perdagangan Sungai Musi turut mendukung penerapannya.

Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama pemerintah kolonial dengan elite lokal seperti pasirah, depati, dan kepala marga untuk mengawasi penanaman tanaman ekspor, terutama kopi dan lada. Meskipun secara resmi rakyat hanya diwajibkan menyediakan seperlima tanahnya, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan berupa pemaksaan lahan dan tenaga kerja

yang lebih besar serta pembayaran hasil panen yang rendah.

Akibatnya, sistem ini menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan kultural berupa berkurangnya kebebasan mengelola lahan, menurunnya produksi pangan, meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial, serta perubahan pola kehidupan masyarakat menuju ekonomi kolonial yang berorientasi pasar internasional.

Banyaknya kritik terhadap penderitaan rakyat dan penyalahgunaan kekuasaan, baik dari masyarakat pribumi maupun kaum liberal di Belanda, mendorong penghapusan tanam paksa secara bertahap sejak 1870 dan penggantian dengan sistem ekonomi liberal, meskipun eksploitasi kolonial tetap berlanjut dalam bentuk yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., dkk. (1991). *Sejarah daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Abubakar, A., dkk. (2020). *Oedjan mas di bumi Sriwijaya*: Bank Indonesia dan heritage di Sumatera Selatan. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Absiroh, Isjoni, & Bunari. (2017). *Sejarah pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Darmawan, A. (2015). *Dampak pelaksanaan cultuurstelsel di Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Resti dkk**, *Pelaksanaan Sistem Tanam...*
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda: Studi tentang ekonomi majemuk*. Jakarta: LP3ES.
- Hafiz, M. (2020). *Perekonomian Palembang masa Kesultanan sampai masa kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang).
- Hanafi, S., & Nawiyanto. (2022). Tanam paksa di Keresidenan Tegal: Kajian tentang sistem, pelaksanaan, dan dampaknya (1830-1870). *Historia*, 4(2), 141-158. <https://historia.jurnal.unej.ac.id>
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar sejarah Indonesia baru 1500-1900*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kielstra, E. B. (1892). *De cultures op Sumatra*. Leiden: E.J. Brill.
- Kurniawan, H. (2015). Dampak sistem tanam paksa terhadap dinamika perekonomian petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 163-172. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Mahyuddin, A. (2013). *Budaya agraris dan perubahan kolonial di Palembang*. Palembang: Pustaka Musi.
- Margono, S. (2012). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubyarto. (1992). *Pengantar ekonomi pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, D. (1980). *Pengantar sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah nasional Indonesia jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rivai, L. (2001). *Sejarah pendidikan di Kota Palembang*. Philosophy Press.
- Romadi. (2011). Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa tanam paksa (1830–1870). *Forum Ilmu Sosial*, 38(1), 32–43. <https://doi.org/10.15294/fis.v38i1.1739>
- Safitri, I. (2017). *Sejarah perekonomian Kota Palembang: Masa pemerintahan kolonial Belanda, 1825–1942 M* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang). <http://eprints.radenfatah.ac.id>
- Sawirman, S. (2010). *Sistem tanam paksa di Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi*. Padang: Universitas Andalas.
- Sinaga, R., dkk. (2025). Dari tanam paksa ke politik etis: Dinamika kebijakan kolonial Belanda dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 300–313. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34116>
- Sondarika, W. (2015). Dampak cultuurstelsel (tanam paksa) bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830–1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59–66. <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/view/337>
- Suhartono. (2010). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, M. (2011). *Struktur sosial dan perubahan masyarakat Sumatera Selatan abad ke-19*. Yogyakarta: Ombak.
- Susilo, A., & Sar, K. (2020). Pengaruh politik cultuurstelsel terhadap perkembangan masyarakat Indonesia tahun 1830–1870. *Jurnal Swadesi*, 1(1).
- Tasnur, I., dkk. (2022). Liberalisme dan monetisasi ekonomi di Hindia Belanda (1870–1900). *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(2), 71–78. <https://doi.org/10.32585/keraton.v4i2.3495>
- Wasino. (2007). *Dari tanam paksa ke politik etis*. Semarang: UNNES Press.
- Wahyono. (2018). *Sejarah ekonomi kolonial di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Zed, M. (2010). *Sumatera dalam lintasan sejarah*. Padang: Pusat Studi Humaniora UNP.
- Zulkarnain, K. A. R. P. (2011). *Sejarah Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Zulkarnain. (2015). Serba-serbi tanam paksa. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*. 8(1),30-46 <https://doi.org/10.2>